

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka diperoleh kesimpulan :

1. Dalam proses pembuatan akta PPAT, seorang PPAT tidak boleh mempengaruhi, membujuk atau menjanjikan sesuatu kepada salah satu pihak. Apabila hal-hal yang diperjanjikan dilanggar atau terjadi wanprestasi hingga menimbulkan tindak pidana penipuan, maka timbulah pertanggungjawab pidana terhadap PPAT tersebut. Seorang PPAT haruslah bersifat netral yang bertugas menuangkan keinginan para pihak kedalam bentuk akta. Jika timbul kesalahan dari hubungan perdata tersebut, maka akan timbul pertanggung jawaban pidannya. Selain itu, proses pengambilan minuta Akta PPAT yang ada di BPN maupun pada PPAT untuk kepentingan penyidikan telah ditunjuk untuk membawa akta PPAT tersebut kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Sebab dalam perkara pidana alat bukti surat yang diminta adalah aslinya. Disini penulis menilai sangatlah menjamin kerahasiaan isi akta sebab akta PPAT ini merupakan dokumen negara.
2. Status akta PPAT setelah dijadikan alat bukti dalam perkara pidana akan menjadi akta otentik apabila ketiga macam pembuktiannya terpenuhi yakni kekuatan pembuktian formal, materiil dan kekuatan pembuktian



lahir yaitu, syarat-syarat dari terbentuk nya akta otentik sudah terpenuhi. Ini menunjukan akta PPAT sebagai akta otentik adalah alat bukti yang sempurna atau istimewa. Namun apabila dalam proses pembuatannya ada unsur pidana maka sanksinya adalah penjara. Begitu juga jika unsur yang dilanggar adalah administratif maka seorang PPAT akan diberikan sanksi sesuai yang diatur dalam keorganisasian PPAT, seperti teguran lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian sementara bahkan diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat.

## **B. Saran**

1. Proses pembuatan akta otentik memerlukan ketelitian dan pengawasan serta itikad baik dari para pihak, agar apa yang dituangkan oleh para pihak bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akta tersebut. Jika sudah ada terjadi penipuan sudah tidak bisa diperbaiki, berbeda dengan unsur kekeliruan, masih ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan dengan cepat begitu kesalahan diketahui.
2. Status akta jika sudah dijadikan alat bukti dalam perkara pidana sebaiknya ditinjau ulang kembali, karena didalamnya terkandung cacat hukum dalam proses pembuatan akta tersebut. Bisa saja akta tersebut turun derajatnya (terdegradasi) atau batal demi hukum.

